

# PEMANFAATAN KAJIAN PEMETAAN BAHASA DALAM RANGKA PENYUSUNAN MATERI MUATAN LOKAL: STUDI KASUS BAHASA JAWA

## MAPPING STUDY LANGUAGE USE IN THE FRAMEWORK OF THE PREPARATION OF LOCAL CONTENT: CASE STUDY LANGUAGE JAVA

**Widada Hadisaputra**

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Jalan Mangunharjo Tembalong, Semarang Telepon: (024) 70769945

Faksimile: (024) 76744358 Laman: <http://www.balaibahasajateng.web.id/>

Tanggal naskah masuk 27 November 2015

Tanggal akhir penyuntingan 15 Desember 2015

### *Abstract :*

*Language teaching in schools, both the Indonesian and regional languages, will always rests on the issue of the selection of materials as a matter of teaching languages, the languages that are considered standard. Standardization of language teaching materials would not only involve the standardization of the language itself, but also concerning standardization linguistic aspects of the language. For the determination of the standard language of the language, must be examined scientifically and to deliberate determination standard language that involves various stakeholders. In addition, certain variants determination as a representation that material must be preceded by a comprehensive study on the number of variants, the number of speakers, as well as the geographical distribution area (mapping language) from the use of these variants. Starting from the above reasoning, the study of the Java language mapping is helpful in determining the Java language teaching materials as local content material. It aims to solve the problem of language diversity, linguistic aspects, and other aspects that are given to students as teaching materials. The benefits derived from the study of the Java language is at least contained practical benefits for teaching the Java language, which reduce the gap in the Java language teaching in the province of Central Java. All regions have similar views, policies, and implementation of the Java language teaching, which in turn will achieve the level of success of language teaching balance among regions exist.*

*Key words: mapping language, local content, language Java*

### *Abstrak :*

*Pengajaran bahasa di sekolah, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, akan selalu bertumpu pada persoalan pemilihan bahan sebagai materi pengajaran bahasa, yaitu bahasa yang dianggap standard. Standardisasi materi pengajaran bahasa tentu tidak hanya menyangkut standardisasi bahasa itu sendiri, tetapi juga menyangkut standardisasi aspek-aspek kebahasaan dari bahasa tersebut. Untuk penentuan bahasa standar dari bahasa itu, haruslah dilakukan kajian secara ilmiah dan melakukan musyawarah penentuan bahasa standard yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di samping itu, penentuan varian tertentu sebagai representasi materi itu haruslah didahului suatu kajian komprehensif tentang jumlah varian, jumlah penutur, serta daerah sebaran geografis (pemetaan bahasa)*

*dari penggunaan varian-varian tersebut. Berawal dari pemikiran di atas, kajian tentang pemetaan bahasa Jawa sangat membantu dalam menentukan materi pengajaran bahasa Jawa sebagai materi muatan lokal. Hal itu bertujuan untuk memecahkan permasalahan tentang ragam bahasa, aspek-aspek kebahasaan, dan aspek lain yang diberikan kepada siswa sebagai materi pengajaran. Manfaat yang diperoleh dari kajian bahasa Jawa ini paling tidak terdapat manfaat praktis bagi pengajaran bahasa Jawa, yaitu memperkecil terjadinya kesenjangan dalam pengajaran bahasa Jawa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Semua wilayah memiliki kesamaan pandangan, kebijakan, dan penerapan pengajaran bahasa Jawa, yang pada gilirannya akan mencapai tingkat keberhasilan pengajaran bahasa seimbang di antara daerah-daerah yang ada.*

Kata-kata kunci : *pemetaan bahasa, muatan lokal, bahasa Jawa*

## **1. Pengantar**

Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat Jawa. Hal itu dapat diketahui dari pemakaian bahasa Jawa dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat etnis Jawa, yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari, dalam dunia pendidikan, dalam media massa, dan lebih-lebih dalam dunia seni pertunjukan tradisional, seperti wayang, ludruk, ketoprak, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Jawa hingga saat ini masih memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat etnis Jawa.

Di samping itu, pengelolaan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal itu dapat diketahui pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 bahwa: "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dsb.), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara, bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang masih hidup".

Dasar hukum lain yang mengatur pengelolaan bahasa daerah dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pasal 42, ayat (1), yang berbunyi: "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Dengan adanya Undang-Undang tersebut semakin jelaslah bahwa fungsi bahasa daerah menjadikan kehidupan bahasa daerah (bahasa Jawa) semakin terjepit. Hal tersebut justru mempercepat kondisi bahasa-bahasa daerah semakin memprihatinkan. Dengan undang-undang tersebut bahasa daerah diperlakukan sama dengan bahasa asing. Padahal

dalam UUD 1945 pasal 32 dinyatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Dengan demikian jelaslah bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Adapun bahasa asing bukan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, tetap sebagai budaya asing. Oleh karena itu, kebijakan yang terdapat pada produk hukum di atas kurang menghargai keberadaan bahasa daerah termasuk di dalamnya bahasa Jawa.

Usaha dalam mempertahankan kehidupan bahasa Jawa itu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa meliputi usaha penginventarisasian segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kebahasaan dan peningkatan mutu pemakaian. Hal ini sesuai dengan keputusan Kongres Bahasa Jawa yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ada beberapa butir keputusan yang berkaitan langsung dengan pelestarian bahasa Jawa, seperti penelitian tentang berbagai aspek bahasa Jawa, penyusunan kurikulum bahasa Jawa, pengembangan bahan pengajaran dan sebagainya.

Di samping itu, terdapat keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik Bahasa tahun 2000 adalah ditentukan fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, (e) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai: (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan

mata pelajaran lain, dan (c) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, serta (d) dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah (Alwi dan Dendy Soegono, 2000).

Kebijakan yang berupa aturan yang mewajibkan dunia pendidikan di Indonesia harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia ternyata memiliki dampak yang kurang positif terhadap keberadaan bahasa daerah. Kebijakan tersebut yang hanya memperbolehkan bahasa Indonesia digunakan untuk sarana pengajaran di kelas secara psikologis telah membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Dalam pada itu, keadaan di atas jelas tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah. Lebih jauh dari itu, kekhawatiran akan terwujudnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Krauss (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori *moribund* dan *endangered* akan menjadi kenyataan. Selain itu, bahasa daerah akan menghilang dari rentangan perbendaharaan bahasa di Indonesia (Soedarmo, 2003), yang sejalan dengan itu, akan turut menghilang pula berbagai nilai-nilai/ keraifan lokal yang terekam dalam bahasa-bahasa daerah itu.

## **2. Kebijakan Pengelolaan Bahasa Jawa dalam Era Otonomi Daerah**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan di bidang bahasa dan sastra daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36, UUD1945 yang telah diamandemen menjadi pasal 36A, 36B, dan 36C, pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengelola keberadaan bahasa daerah agar aspirasi dan keinginan masyarakat yang memiliki dan menggunakan bahasa daerah itu dapat terwujud. Hal itu berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan bahasa Jawa pada akhir-akhir ini. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, adanya

kebijakan yang memberlakukan pengajaran bahasa Jawa di sekolah dari jenjang TK sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas merupakan suatu prestasi yang luar biasa dalam rangka mempertahankan eksistensi bahasa Jawa di masyarakat, khususnya bagi generasi mudanya.

Dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada hakikatnya berusaha memperhatikan kepentingan-kepentingan bahasa Jawa dengan tetap mengacu kepada kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan bahwa kebijakan politik itu mutlak menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa. Sehubungan dengan hal tersebut, secara luas dan terbuka diakui bahwa belum seluruhnya pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan apa yang menjadi wewenangnya yang berupa upaya-upaya konkret dalam memajukan pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh alasan yang sifatnya klasik yaitu adanya keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara terencana telah memprogramkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa. Hal itu dapat diketahui adanya program pembinaan yang berupa lomba penulisan aksara Jawa, lomba membaca geguritan, lomba pidato dalam bahasa Jawa, pertemuan-pertemuan bahasa dan sastra Jawa, dan sebagainya. Adapun bidang pengembangan bahasa Jawa yang salah satunya penyusunan materi pengajaran sampai saat ini masih dalam proses perencanaan.

## **3. Penelitian Pemetaan Bahasa Jawa**

Sampai saat ini memang bahasa Jawa masih mempunyai fungsi dan kedudukan yang cukup penting dalam masyarakat etnis Jawa. Hal itu dapat diketahui dari pemakaian bahasa Jawa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dalam pergaulan secara informal tetapi juga digunakan sebagai alat komunikasi formal dalam masyarakat Jawa, misalnya sebagai bahasa pengantar dalam media massa, dalam dunia pendidikan di sekolah dasar kelas rendah dan juga dipakai dalam upacara-upacara adat. Di samping itu, bahasa Jawa masih efektif sebagai sarana atau wahana dalam pelestarian kebudayaan Jawa, seperti dalam pelestarian kesenian Jawa. Akan tetapi, jika diperhatikan

keadaan tersebut sudah jauh dari kenyataan yang terjadi pada dua puluh tahun yang silam. Indikasi ini diperkuat oleh sebuah penelitian pemakaian bahasa Jawa di Kota Semarang (Handono, 2004) yang menyatakan bahwa para remaja di kota tersebut hanya tinggal kurang dari 40% saja yang memahami bahasa Jawa. Adanya kenyataan seperti itu, tentunya pemerintah daerah akan segera melakukan kebijakan agar bahasa Jawa tetap dipakai oleh generasi mudanya sebagai alat komunikasi keluarga atau alat komunikasi dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Sejak tahun 1992, Pusat Bahasa (dahulu masih bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) bertekad melakukan pemetaan dan penelitian tentang kekerabatan bahasa-bahasa Nusantara yang tujuannya selain untuk mengidentifikasi jumlah bahasa yang ada di seluruh Nusantara juga untuk membuat peta bahasa Nusantara dan menentukan hubungan kekerabatan bahasa-bahasa di seluruh Nusantara. Apa yang dilakukan oleh Pusat Bahasa tersebut tentunya merupakan sebuah pekerjaan sangat besar yang tentunya memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, Pusat Bahasa telah berhasil membuat peta bahasa Nusantara yang peluncurannya bertepatan dengan pelaksanaan Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta tahun 2008.

Dengan melibatkan dan mendayagunakan tenaga-tenaga yang ada di unit pelaksana teknis (UPT) bawahannya, yaitu balai dan kantor bahasa yang berada di hampir setiap provinsi, pada tahun 2006 Pusat Bahasa memulai pekerjaan besarnya untuk membuat peta bahasa Nusantara. Pekerjaan itu dilakukan secara serentak, baik di Pusat bahasa maupun di balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia. Pekerjaan itu dimulai dari memverifikasi dan menganalisis data-data yang sudah ada untuk daerah-daerah yang sudah mempunyai data (sebagian daerah sudah diambil datanya oleh Pusat Bahasa pada tahun 1992). Sementara itu untuk daerah yang belum diambil data, seperti Papua, Maluku, sebagian Sumatera dan Kalimantan, pekerjaan dimulai dengan pengumpulan data.

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu UPT Pusat Bahasa yang ada di Jawa Tengah, yang disertai tugas untuk mengidentifikasi jumlah bahasa, dialek, dan subdialek di Jawa Tengah, serta membuat peta bahasa Jawa Tengah pada tahun 2006 ikut

bergerak memulai pekerjaannya dengan memanfaatkan data-data yang sudah terkumpul sejak tahun 1992. Namun, karena keterbatasan tenaga dan waktu, sementara jumlah data yang dianalisis cukup banyak, pada akhir tahun 2006 pekerjaan yang dapat diselesaikan baru sampai pada penabulasian tahap I dan II.

Karena penelitian yang dilakukan tahun 2006 tersebut baru pada tahap penabulasian, belum sampai pada penghitungan dialektometri dan leksikostatistik, masih belum dapat dibuktikan apakah varian-varian yang teridentifikasi tersebut merupakan satu dialek tersendiri atau tidak. Selain itu, pembuatan peta bahasa Jawa Tengah pun belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada tahun 2007 program pemetaan bahasa di Jawa Tengah diadakan kembali dengan tujuan melanjutkan program pemetaan tahun 2006.

Penelitian pemetaan bahasa Jawa ini mempunyai tiga tujuan besar, yakni mengkaji secara sinkronis dan diakronis serta membuat peta unsur-unsur kebahasaan di wilayah Jawa Tengah. Tujuan secara sinkronis berusaha menentukan status hubungan antarisolek dan menentukan status isolek sebagai bahasa, dialek, atau subdialek tertentu, serta menentukan jumlah dialek dan bahasa. Tujuan secara diakronis berusaha menentukan hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu tujuan membuat peta adalah untuk mendapatkan gambaran sebaran geografis bahasa, dialek dan subdialek yang ada di Jawa Tengah.

Memang penelitian tentang geografi dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah telah dilakukan oleh beberapa ahli, tetapi pada umumnya terbatas pada dialek daerah Jawa Tengah bagian tertentu dan dilakukan secara terpisah. Dengan demikian, penelitian mengenai geografi dialek, khususnya pemetaan bahasa Jawa di wilayah Jawa Tengah, secara menyeluruh sejauh ini belum pernah dilakukan. Beberapa orang yang telah melakukan penelitian mengenai geografi dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut.

**Tabel**  
**REKAPITULASI TEMUAN PENELITIAN JUMLAH BAHASA DAN DIALEK**

No.	Jumlah Bahasa	Nama Bahasa/Dialek	Sebaran Geografis/DP	Konversi DP
1.	2 buah	1. Jawa	5—36 dan 41—44	
		a. Semarsuradupati	5—16, 29—32, 41—44	5 = Tanjung, Klego, Boyolali 6 = Jatisobo, Jatipuro, Karanganyar 7 = Jengkrik, Kedawung, Sragen 8 = Pendem, Sumber Lawang, Sragen 9 = Klopo Duwur, Banjarejo, Blora 10= Bamban, Pamotan, Rembang 11= Boloagung, Kayen, Pati 12= Pohijo, Margoyoso, Pati 13= Candirejo, Tuntang, Semarang 14= Wonosari, Bonang, Demak 15= Sambirejo, Wirosari, Grobogan 16= Mojoagung, Kr. Rayung, Grobogan 17= Brekat, Tarub, Tegal, 8= Tuwel, Bojong, Tegal 19= Ciomas, Bantarkuwung, Brebes 20= Kersana, Kersana, Brebes 21= Banyuputih, Limpung, Batang 22= Bojong Wetan, Bojong Pekalongan 23= Domiyang, Paninggaran, Pekalongan 24=Sarwodadi, Bantarbolang, Pemalang 25=Kedungreja, Kedungreja, Cilacap 26=Madura, Wanareja, Cilacap 27=Karang Benda, Adipala, Cilacap 28=Ciberung, Ajibarang, Banyumas 29=Lanji, Patebon, Kendal 30=Kajar, Dawe, Kudus 31=Bumiharjo, Keling, Jepara 32=Karimunjawa, Karimunjawa, Jepara 33=Sruweng, Sruweng, Kebumen 34=Wadaslintang, Wadaslintang, Wonosobo 35=Candi Rejo, Mojo Tengah, Wonosobo 36=Kandangan, Kandangan, Temanggung 41=Paduroso, Purworejo, Purworejo 42=Kepuh, Kutoarjo, Purworejo 43=Gejagan, Pakis, Magelang 44=Candirejo, Borobudur, Magelang
		b. Pekalongan	21—24	
		c. Wonosobo	34—35	
1.	2 buah	d. Banyumas	25, 27, 28, 33	
		e. Tegal	17, 18, 20	
		2. Sunda	19, 26	
				19= Ciomas, Bantar Kuwung, Brebes 26= Madura, Wanareja, Cilacap

Walbeehm telah menulis tentang dialek Jepara (1897) dan mendeskripsikan dialek Tegal (1903). Esser (1927) menulis tentang dialek



Banyumas dengan mengambil data dari beberapa daerah di Purwokerto, Purbalingga, dan Cilacap (Uhlenbeck, 1964:63—64).

Dibandingkan dengan peneliti lain, Nothofer (1980) melakukan penelitian geografi dialek yang lebih mendalam dialek-dialek bahasa Jawa di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat dilengkapi dengan pemetaan bahasa dan penjelasannya. Sebagai kelanjutannya, kajian geografi dialek dilengkapi dengan peta dialek Jawa Tengah dan sebagian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pula olehnya (Nothofer, 1981). Namun, peta dialek yang dibuat oleh Nothofer tersebut belum mencakupi seluruh wilayah Jawa Tengah karena yang dibuat baru sebatas wilayah Jawa Tengah bagian barat, yakni dari wilayah Utara adalah dari Batang ke barat sampai Brebes, sedangkan dari wilayah selatan adalah dari Gunung Kidul ke arah Barat sampai Cilacap.

Peneliti lain adalah Suwadi dkk. (1981) yang meneliti geografi dialek Banyumas dan Tegal. Sabariyanto dkk. Meneliti geografi dialek Rembang (1982), Pati (1983), Purworejo (1983), dan Jepara (1985). Kemudian Adisumarto dkk. meneliti di Cilacap (1981/1982) dan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara (1982). Hadiatmaja (1986) meneliti tentang dialek bahasa Jawa Yogyakarta. Baribin (1986) tentang bahasa Jawa di Kotamadya Semarang. Sudaryono (1990) meneliti geografi dialek Kabupaten Demak. Kemudian Markhamah (1994) membuat penelitian geografi dialek yang lebih luas, yaitu bahasa Jawa di segi empat meliputi Pekalongan, Kendal, Banjarnegara dan Temanggung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan variasi fonologis jika dibandingkan dengan bahasa Jawa baku.

Sasangka (1999) dalam penelitiannya di daerah Brebes menyatakan terdapat dua bahasa yang saling bersinggungan di daerah Brebes, yaitu bahasa Jawa (BJ) dan bahasa Sunda (BS) yang menjadikannya bahasa khas tersendiri kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa standar di Yogyakarta dan Surakarta dan bahasa Sunda standar di Bandung. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa bahasa Sunda Brebes banyak menyerap kosakata bahasa Jawa Brebes. Katrini (1992) melakukan penelitian dengan membandingkan dialek Banyumas dan bahasa Sunda, sedangkan dalam disertasinya dia meneliti bahasa Jawa di Jawa Tengah bagian timur (2002).

#### **4. Hasil Pemetaan Bahasa Jawa di Jawa Tengah**

Sebagaimana diketahui bahwa deskripsi perbedaan unsur-unsur kebahasaan bahasa Jawa di Jawa Tengah telah disajikan dalam laporan penelitian pemetaan bahasa Jawa Tengah tahun 2006 dalam bentuk peta verbal yang berupa tabulasi tahap I dan II. Dari hasil penabulasian tersebut kemudian dilakukan penghitungan secara dialektometri untuk menentukan status hubungan isolek-isolek yang ada di tiga puluh enam (36) daerah pengamatan (DP). Perlu diketahui bahwa tidak semua data yang telah diperoleh dari semua daftar tanya, yang jika diakumulasikan ada sekitar 1200 glos, dianalisis. Mengingat keterbatasan waktu dan pertimbangan keterwakilan data, akhirnya dipilih 400 glos sebagai bahan analisis dan pembuatan peta. Dengan demikian, untuk penerapan metode dialektometri bersumber pada peta yang dihasilkan dari 400 glos (meliputi 200 kosakata dasar Swadesh dan 200 kosakata budaya dasar) yang dianalisis.

Berdasarkan penghitungan dialektometri dapat dikatakan bahwa dari semua DP yang dibandingkan terdapat kategori hubungan perbedaan dialek, subdialek, wicara, dan perbedaan bahasa. Jika dilihat masing-masing kategori hubungan terdapat 21 perbedaan dialek, 46 perbedaan subdialek, 6 perbedaan wicara, 6 perbedaan bahasa, dan 4 tidak ada perbedaan. Untuk perbedaan hubungan bahasa terdapat di DP-DP yang berhubungan dengan DP 19 dan 26, yaitu DP yang menggunakan bahasa Sunda. Dengan demikian, di wilayah Jawa Tengah terdapat dua pemakaian bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Sunda

Berdasarkan interpretasi data hasil penghitungan dialektometri terhadap hubungan antarisolek yang ada di Jawa Tengah diperoleh hasil bahasa dan dialek di wilayah Jawa Tengah sebagai berikut.

a. Bahasa Jawa, terdiri atas lima dialek, yaitu:

- 1) Dialek Semarapura (kependekan dari Semarang, Surakarta, Kedu, dan Pati), mencakup wilayah besar Jawa Tengah bagian timur yang meliputi tiga eks-Karesidenan, yakni: Karesidenan Semarang, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati.
- 2) Dialek Pekalongan, mencakup daerah Kabupaten/Kota Pekalongan, kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.

- 3) Dialek Wonosobo, mencakup daerah Kabupaten Wonosobo
  - 4) Dialek Banyumas, mencakup daerah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.
  - 5) Dialek Tegal, mencakup daerah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
  - b. Bahasa Sunda, mencakup satu desa di wilayah Kabupaten Brebes dan satu desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
- Pembagian status isolek seperti di atas dapat lebih jelas dilihat pada tabel di atas.

## 5. Peta Dialek Bahasa Jawa di Jawa Tengah

**PETA 1**  
**PETA DIALEK JAWA TENGAH**

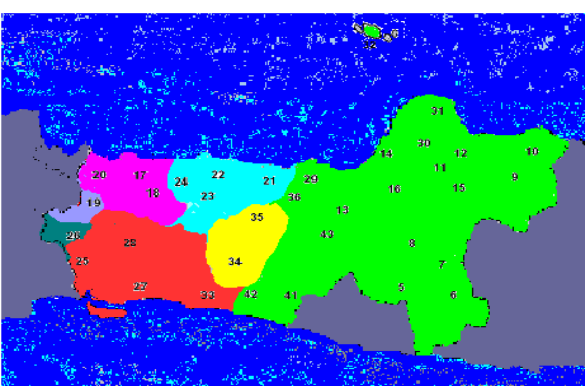
Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa hasil penghitungan dialektometri terhadap isolek-isolek yang ada di Jawa Tengah telah ditemukan sebanyak lima dialek bahasa Jawa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kelima dialek tersebut adalah dialek Semarsuradupati (kependekan dari Semarang, Surakarta, Kedu, dan Pati), dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, dialek Banyumas, dan dialek Tegal. Letak wilayah kelima dialek tersebut akan lebih jelas



bila dilihat dalam bentuk gambar peta dialek (lihat PETA 1).

Peta bahasa Jawa Tengah ialah peta yang memuat jumlah dan wilayah persebaran bahasa-bahasa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ditemukan ada dua bahasa yang dipakai di wilayah Jawa Tengah, yaitu bahasa Jawa yang dipakai hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan bahasa Sunda yang dipakai di daerah perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat (lihat peta 2).

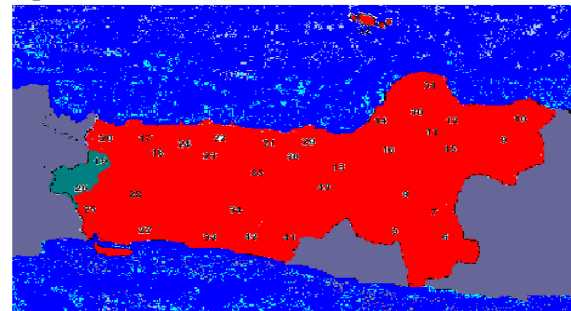
**PETA 2**  
**PETA BAHASA JAWA TENGAH**



## 5. Penyusunan Materi

### Pengajaran Bahasa Jawa

Standardisasi bahasa tentu tidak hanya menyangkut standardisasi bahasa itu sendiri, tetapi juga menyangkut standardisasi aspek-aspek kebahasaan dari bahasa tersebut.



■ Bahasa Jawa  
■ Bahasa Sunda

Menyangkut standardisasi bahasa, dimaksudkan bahwa dalam suatu bahasa, apakah itu bahasa nasional, bahasa asing, atau bahasa daerah, dalam praktik pemakaiannya, tidak pernah hadir dalam suatu sosok yang homogen. Ia hadir dalam berbagai varian, baik itu berupa variasi sosial maupun variasi dialektal (geografis). Oleh karena itu, untuk penentuan bahasa standar dari bahasa itu haruslah dilakukan kajian secara sosiolinguistik dan melakukan musyawarah penentuan bahasa standar yang melibatkan berbagai *stakeholders* dengan bertumpu pada hasil kajian secara sosiolinguistik tersebut. Dalam pada itu, penentuan varian tertentu sebagai representasi dalam berbahasa secara baik dan benar pada bahasa itu haruslah didahului oleh suatu kajian yang komprehensif tentang jumlah varian, jumlah penutur serta daerah sebaran geografis dari penggunaan varian-varian tersebut.

Adapun yang menyangkut standardisasi aspek tertentu dari suatu bahasa, maksudnya adalah upaya kodefikasi aspek-aspek kebahasaan seperti standardisasi aspek ejaan (tatatulis), tata bahasa dan lainnya. Standardisasi dalam pengertian yang terakhir ini, tentu akan memanfaatkan hasil kajian linguistik teoretis, seperti hasil kajian fonologi untuk dasar penentuan standardisasi ejaan, hasil kajian bidang morfologi dan sintaksis untuk standardisasi tata bahasa. Untuk standardisasi ejaan telah dilakukan yaitu berupa penyusunan pedoman ejaan bahasa Jawa, tetapi untuk standardisasi tata bahasanya masih harus disusun berdasarkan kajian sifatnya ilmiah. Hasil penyusunan itu diharapkan sesuai dengan yang diperlukan sebagai materi pengajaran bahasa Jawa di sekolah.

Selanjutnya, oleh karena dalam pengajaran bahasa tercakup pula pengajaran kesastraan, maka diperlukan pula bahan-bahan yang menyangkut kesastraan. Dalam hal ini, informasi yang menyangkut bentuk, jenis, sikap masyarakat pendukung, kapan karya itu digunakan, serta kira-kira berapa jumlah peminat dan pencipta sastra yang masih hidup dalam komunitas tutur bahasa tertentu, yang akan dijadikan bahan materi pengajaran tersebut. Dalam hubungan ini, maka kajian yang menyangkut persoalan distribusi bentuk dan jenis karya sastra yang masih tumbuh dan berkembang pada masyarakat tutur yang menjadi objek pengembangan materi muatan lokal ini haruslah dilakukan secara komprehensif. Selain itu, kajian sastra harus pula di arahkan pada kebutuhan dalam mendesain materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin dikaji dalam studi ini. Dalam hal ini, harus tergambar misalnya bentuk dan jenis sastra yang relevan bagi materi untuk tingkat TK, yang berbeda dengan misalnya untuk tingkat SD. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut bentuk dan jenis tetapi juga menyangkut isi. Atas dasar itulah nantinya akan dilakukan seleksi materi kebahasaan dan kesastraan yang akan dijadikan bahan pada lokakarya pengembangan Garis-garis Besar Program Pengajaran dan pengembangan materi pengajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan tempat materi itu akan diajarkan. Dan pada akhirnya, materi yang tersusun itu haruslah diuji coba tentang kelayakannya berdasarkan wilayah dan sasaran, kesesuaiannya dengan tujuan pengajaran, mengevaluasi pelaksanaannya, serta membuat rekomendasi. Tentunya, kegiatan ini haruslah diawali dengan kegiatan pelatihan calon guru yang akan mengajarkan materi yang akan diujicobakan itu.

Berangkat dari pemikiran di atas, studi program pengajaran bahasa Jawa sebagai materi muatan lokal pada jenjang pendidikan formal di Provinsi Jawa Tengah ini mendesak untuk dilaksanakan. Adapun tujuan studi pengembangan program pengajaran bahasa Jawa adalah ingin memecahkan persoalan-persoalan seleksi dan pengembangan materi pengajaran bahasa Jawa harus melalui usaha pengkajian bahasa yaitu:

- a. penentuan varian bahasa Jawa di daerah dan termasuk daerah persebarannya (peta bahasa);

- b. pengembangan materi pengajarannya melalui lokakarya pengembangan bahan ajar (kebijakan penyusunan materi bahan ajar);
- c. penentuan salah satu varian dalam masing-masing bahasa itu sebagai acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar);

Tujuan kegiatan kajian pemetaan bahasa sebagai dasar penyusunan materi/bahan pengajaran bahasa sebagai muatan lokal ini adalah menjadikan berbagai varian bahasa, seperti varian bahasa Jawa wilayah Tegal, bahasa Jawa wilayah Banyumas, dan varian bahasa Jawa wilayah Surakarta sebagai materi muatan lokal pada lingkup masing-masing penuturnya. Hal ini dengan penekanan tidak hanya pada upaya menjadikan bahasa itu digunakan secara baik dan benar oleh penuturnya, tetapi juga sebagai medium untuk penanaman nilai-nilai moral, etika, dan estetika pada anak didik. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pendidikan, yang tidak hanya berupaya mengembangkan kemampuan logika, tetapi juga etika, dan estetika yang terkandung dalam setiap varian bahasa dapat dicapai melalui pengajaran muatan lokal.

## 6. Penutup

Setidak-tidaknya terdapat manfaat praktis dari pemanfaatan kajian pemetaan bahasa bagi penyusunan materi pengajaran bahasa Jawa sebagai materi muatan lokal di sekolah. Dengan mengetahui batas-batas wilayah varian bahasa Jawa, yaitu dialek bahasa Jawa, pemerintah daerah dapat menentukan pilihan dialek apa yang dijadikan materi muatan lokal tersebut. Di samping itu, manfaat lain yang didapat adalah semakin terarahnya tujuan akhir pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah di samping sebagai upaya pengembangan kemampuan berpikir pada peserta didik (siswa) dengan latar belakang bahasa ibunya, juga menjadi upaya dalam pengembangan kemampuan estetika dan etika dalam rangka mewariskan nilai-nilai budaya kepada anak didik seperti apa yang terkandung dalam dialek yang dikuasainya. Untuk kemanfaatan yang pertama dapat dijelaskan bahwa melalui pemilihan pemakaian dialek bahasa Jawa yang sesuai akan memberikan kemampuan anak dalam berbahasa secara baik dan benar. Kemudian, melalui kemampuan memilih penggunaan bentuk bahasa tertentu dalam bahasa yang digunakan itu ketika harus berbicara dengan mitra wicara tertentu, dengan topik serta tempat tertentu pada dasarnya terkait



dengan masalah etika (moral dan kesantunan). Dalam pada itu pula, pembentukan etika dan estetika dalam pengajaran muatan lokal dapat dilakukan pula melalui pemberian materi kesastraan yang sudah terseleksi untuk tujuan itu, yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pendukung bahasa dan sastra yang hendak diajarkan tersebut.

Upaya pelestarian bahasa Jawa melalui jalur pendidikan formal mengalami banyak kendala. Yang pertama, tingkat penguasaan bahasa Jawa yang dimiliki oleh siswa tidak merata karena adanya latar belakang berbeda-beda. Kendala lain yang menghadang di depan adalah faktor-faktor pelaksanaan di lapangan, yaitu (1) tenaga guru yang representatif untuk mengampu pengajaran bahasa Jawa dengan baik, (2) ketersediaan buku-buku pelajaran bahasa Jawa yang bersesuaian dengan daerah tempat terjadi proses pembelajaran, (3) penyusunan alat evaluasi/pengujian yang standar untuk berbagai daerah, dan (4) jumlah biaya akan membengkak besar karena materi pengajaran yang disusun bervariasi berdasarkan kekhasan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam usaha mewujudkan upaya ini perlu adanya kerja sama yang baik antar lembaga, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi yang mencetak guru bahasa Jawa, lembaga pengkajian dan penelitian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dan Dendy Soegono. 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ayatrohaedi. 1979. *Dialektologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Cummins, J. 1989. *Empowering Minority Students Sacramento CABE; The Sanitized Curriculum: Educational Disempowerment in a Nation at Risk*. In Richness in Writing: *Empowering ESL Students*. Ed. By D. Junction and D. Roen. Hal. 19-38. New York: Long Man.
- Fernandez, Inyo Yos .1992. "Dialektologi Sebuah Pengantar". Makalah Penataran Lokakarya Linguistik Sinkronis-Diakronis. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP SanataDharma Yogyakarta.
- Freeman, Yvonne S and Freeman, David E. 1992. *Whole Language for Second Language Learners*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Greenfield, L. 1972. "Situational Measures of Normative Language Views in Relation to Person, Place, and Topic Among Puerto Rican Bilinguals". Dalam J.A. Fishman ed. (1972). *Advances in the Sociology of Language, Vol 2*. The Hague: Mouton.
- Katrini, Yulia Esti. 1982. "Pemerian Dialek Banyumas dan Perbandingannya Dengan Bahasa Sunda", Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- 2002. "Bahasa Jawa di Jawa Tengah Bagian Timur: Sebuah Kajian Geografi Dialek". Disertasi S-3 Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Krauss, Michael. 1992. "The World's Languages in Crisis". Dalam *Language*. Vol. 68, 1: 4-10.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2000. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinnekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah". Dalam *Politik Bahasa 2000*. Pusat Bahasa: Jakarta.
- , 2005. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2006. "Panduan Analisis Data Pemetaan dan Hubungan Kekerabatan Bahasa-Bahasa di Indonesia". Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Markamah. 1994. "Geografi Dialek Bahasa Jawa di Segi Empat : Pekalongan-Kendal, Banjarnegara-Temanggung". Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mu'adz, M. Husni. 1998. " Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VII, tanggal 26-30 Oktober 1998, di Jakarta.
- Nothofer, Bernd. 1981. *Dialektatlas von Zentral Java*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz
- Sabariyanto, Dirgo dkk. 1985. *Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Samarin, William. 1988. *Linguistik Lapangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- SIL International, Indonesia Branch. *Languages of Indonesia*. Jakarta: 2001
- Sommerset, H.C.A. 1990. *Developing Curriculum: Some Back-ground Issues*. Makalah seminar di Pusat Kurikulum, Depdikbud, 28-30 Mei 1990.
- Steinhauer, Hein. 2000. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Indonesia*. Kaswanti Poerwo (ed.) 2000: 175-195.
- Sudaryanto. 1991. "Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Tegangan antara Pesimisme dan Optimisme". Dalam Sudaryanto (ed.) *Prosiding Kongres Bahasa Jawa I*. Surakarta: Harapan Masa.
- Sudaryono, dkk. 1990. *Bahasa Jawa di Kabupaten Demak*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Suwaji, dkk. 1981. *Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah*. (Tegal dan sekitarnya). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Uhlenbeck, E.M. 1964. *A Critical Survey of Studies on The Languages of Java and Madura*. 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- Wakid, M. 1994. "Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Madiun" (Tesis belum diterbitkan) Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Zaidan, Abdul Rozak. 2003. *Pedoman Penelitian Sastra Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.